

BAB IV

SIMPULAN

Penulis melakukan tinjauan mengenai pelaksanaan belanja bantuan sosial pada tiap-tiap Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Penerapan Akuntansi Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Masa Pandemi”. Penulis menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan pada Bab I Pendahuluan, selanjutnya penulis memaparkan teori-teori dan ketentuan terkait belanja bantuan sosial pada Bab II Landasan Teori yang menjadi dasar untuk membandingkan antara pelaksanaan belanja bantuan sosial pada tiap-tiap Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan teori dan dasar hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan belanja tersebut.

Pada Bab III Metode dan Pembahasan, Penulis menjelaskan mengenai hasil pembahasan yang dilakukan. Selanjutnya Penulis menarik kesimpulan atas hasil tinjauan sebagai berikut:

1. Hasil Tinjauan atas Dampak Pandemi Terhadap Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Belanja bantuan sosial pada tiap-tiap Pemerintah Daerah di DIY tidak banyak terpengaruh atas adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut terjadi karena pengeluaran yang digunakan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 yang salah satunya untuk keperluan jaring pengaman sosial berupa pemberian bantuan sosial dianggarkan pada Belanja Tak Terduga. Sehingga, anggaran Belanja Bantuan Sosial yang dilaksanakan tiap-tiap Pemda digunakan untuk membiayai program-program yang telah berjalan sebelumnya.

Meskipun penanganan dampak pandemi Covid-19 dibiayai dengan anggaran pada Belanja Tak Terduga, anggaran Belanja Bantuan Sosial juga mengalami pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan mengalihkan anggaran belanja pada Belanja Tak Terduga. Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada Pemda di DIY terdapat perubahan anggaran yang naik, turun, dan tetap. Perubahan anggaran Belanja Bantuan Sosial pada tiap-tiap Pemda di DIY sebagai berikut.

Tabel IV.1 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah di DIY Tahun 2020

Pemerintah Daerah	Perubahan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Turun
Kota Yogyakarta	Turun
Kabupaten Bantul	Turun
Kabupaten Gunungkidul	Naik
Kabupaten Kulon Progo	Tetap
Kabupaten Sleman	Naik

Sumber: Diolah oleh Penulis

2. Hasil Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tiap-tiap Pemda di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pedoman terhadap kebijakan akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Namun, peraturan yang digunakan tiap-tiap Pemda tersebut tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dari tinjauan Penulis, secara umum perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh seluruh Pemda di DIY telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Jika ditinjau menggunakan Buletin Teknis Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial, perlakuan akuntansi belanja bansos yang dilakukan seluruh Pemda di DIY juga telah sesuai ketentuan.

Namun masih ada beberapa kekurangan terhadap pengungkapan belanja bansos pada Pemda di DIY. Masih terdapat beberapa informasi yang seharusnya diungkapkan, namun belum diungkap yang meliputi:

- a. seluruh Pemda di DIY tidak menjelaskan perlakuan akuntansi secara khusus akun belanja bansos yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan;
- b. seluruh Pemda di DIY tidak menjelaskan secara spesifik terkait kendala atas tidak terserapnya seluruh anggaran belanja bansos;
- c. hanya Pemprov DIY yang menjelaskan terkait informasi bentuk bansos yang diberikan, apakah dalam bentuk uang atau barang/jasa;
- d. Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Gunungkidul tidak menyajikan pada CaLK terkait rincian kegiatan belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Sehingga, Penulis kesulitan dalam menentukan apakah pengeluaran yang dilaksanakan

memenuhi seluruh kriteria pengakuan yang terdapat pada Bultek No. 19 atau tidak.

3. Hasil Tinjauan atas Penyesuaian Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Tiap-Tiap Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Akibat Pandemi

Berikut ini adalah penyesuaian anggaran belanja bansos tahun 2020 dan realisasinya pada tiap-tiap Pemda di DIY.

Tabel IV.1 Perbandingan Perubahan Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020

Pemerintah Daerah	Anggaran (Rp)		Realisasi	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	45.002.874.000	11.391.484.880	9.009.947.911	79,09
Kota Yogyakarta	47.341.295.000	32.131.465.000	25.029.937.400	77,90
Kabupaten Bantul	6.810.000.000	2.835.000.000	759.900.000	26,80
Kabupaten Gunungkidul	2.637.000.000	5.454.500.000	3.587.432.500	65,77
Kabupaten Kulon Progo	20.040.000.000	20.040.000.000	10.984.500.000	54,81
Kabupaten Sleman	28.630.250.000	64.839.000.000	53.395.042.950	82,35

Sumber: Diolah dari LKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020